

jalannya pemerintahan tersebut. Dan tentunya partai politik tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh rakyat untuk ikut serta berperan aktif di dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Dan melalui partai politik itulah rakyat dalam satu negara memilih para wakil mereka untuk duduk di dewan, yang mana dengan dewan tersebut akan memberikan saran-saran dan mengawasi jalannya pemerintahan. Agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat.

Oleh karena itulah, maka secara tidak langsung partai politik sangat berperan di dalam menentukan jalannya satu pemerintahan. Hal itu dikarenakan partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat banyak. Untuk itulah partai yang pada akhirnya dapat , memerintah satu negara haruslah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan sebaiknya. Adapun fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Partai Politik Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Dalam fungsi ini, partai politik berfungsi sebagai media atau perantara antara rakyat dengan pemerintah. Maka tidak salah kalau partai politik dikatakan jembatan antara masyarakat dengan pemerintah. Fungsi tersebut di laksanakan dengan mendengarkan menggabungkan serta merumuskan aspirasi yang berasal dari masyarakat

kemudian menuangkannya kedalam bentuk program partai. Ferumusan dalam bentuk program tadi mencerminkan inti dari aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk diperjuangkan dalam proses pembuatan kebijaksanaan umum. Dari sini partai politik menjadi penyalur aspirasi yang datang dari bawah (masyarakat).

Dari atas (pemerintah) pun partai politik bisa berfungsi pula sebagai penyalur segala keputusan kebijaksanaan yang telah dihasilkan dan yang mengikat masyarakat secara keseluruhan. Hal ini nampak di negara Indonesia dalam orde baru dimana partai politik merupakan partner pemerintah dalam mensukseskan kebijaksanaan umum. Hal ini terbukti ketika pemerintah melancarkan kebijaksanaan keluarga berencana secara nasional. Dalam hal ini partai politik bisa berfungsi sebagai penyebar serta sarana untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pentingnya program berencana ini demi masa depan bersama.

Demikian juga tentang undang-undang Perpajakan partai politik dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa membayar pajak adalah kewajiban setiap warga negara dan bahwa pajak yang dipungut tadi akan terhimpun sebagai dana pelayanan umum seperti; rumah sakit, pasar, sekolah, dan lainnya. Dengan demikian masyarakat dapat diyakini bahwa pajak yang mereka bayar tidak akan hilang

"Dari Aisyah ra. Sesungguhnya orang-orang Quraisy menangkap seorang wanita yang terkemuka mencuri. Maka seorang quraisy berkata: Siapakah yang akan menyampaikan masalah ini kepada Rasulullah. Dan tidak ada yang cocok untuk menyampaikan masalah itu kecuali Usamah kekasih Rasulullah saw. Lalu Usamah memohonlah kepada Rasul, maka Rasulullah saw. bersabda: Adakah (patut) engkau memintakan kebebasan dari satu had dari pada had atau yang diwajibkan oleh Allah? kemudian ia berdiri lalu berkhatbah, yaitu ia berkata: Hai manusia! Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa lantaran apabila orang yang mulia diantara mereka mencuri, mereka bebaskan dia, tetapi apabila orang yang lemah diantara mereka mencuri, mereka berikan padanya (hukum) had. Aku bersumpah demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, sekiranya Fatimah, putri Muhammad, melakukan (mencuri) niscaya akan aku potong tangannya. (Ahmad bin Ali Bin Hajar, t.t., 87).

2. Partai Politik Sebagai Sarana Sosialisasi Politik.

Partai politik merupakan wadah aspirasi rakyat banyak dan karena itulah maka partai politik mempunyai fungsi diberbagai bidang, yang mana fungsi itu bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat di negara itu partai itulah yang mempunyai peranan penting di dalam pemerintahan, karena partai haruslah memperjuangkan kepentingan angan-angan rakyat banyak. Dan dikarenakan partai politik itu mempunyai fungsi diberbagai bidang dalam rangka untuk menentukan jalannya suatu pemerintahan, maka partai politik itu hendaklah dilestarikan dari suatu generasi kegenerasi berikutnya.

Untuk meneruskan kebudayaan politik dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya, di perlukan suatu sarana yang istilah sekarang terkenal dengan sebutan "Sosialisasi Politik". Dan sebagai sarana Sosialisasi Politik, maka partai berkewajiban untuk mengajarkan ideologi partai kepada para anggotanya atau para pendukungnya, mengajarkan norma-norma politik yang ada dan berlaku di dalam masyarakat atau Negara dimana partai itu berada. Serta mengajarkan apa yang menjadi hak, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik.

Islam sendiri membolehkan adanya penerusan kebudayaan politik dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Ini terbukti ketika Rasulullah saw meninggal dunia, para sahabat masih menunjukkan adanya rasa takut menghadapi situasi politik karena adanya kekosongan sendiri yang bertanggung jawab menangani masalah-masalah politik dalam pemerintahan Islam itu, oleh karena itu diperlukan adanya generasi penerus yang bisa menggantikan kedudukan Rasulullah saw. dalam menangani masalah-masalah politik dalam pemerintahan Islam itu, yang pada akhirnya tampuk pemerintahan dipegang oleh: Abu Bakar Siddiq ra, Umar bin Khatthab ra, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib.

Usaha sosialisasi yang bisa dilakukan adalah

menerangkan hak dan kewajiban warga negara, ikut pemilihan umum menyelenggarakan kursus-kursus kader, latihan berorganisasi dan lain-lain. Sehingga tiap organisasi sosial politik hanya dapat berkembang dalam masyarakat apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Antara lain memilih dan dukungan oleh kader yang dapat diandalkan.

Dalam Undang-Undang No 3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya lain disebutkan antara lain:

- a. Pasal 5 huruf (b), membina anggota-anggotanya menjadi warga negara Republik Indonesia yang bermoral Pancasila serta terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu wadah untuk mendidik politik rakyat kesadaran politik rakyat.
- b. Pasal 8 ayat (1) disebutkan, yang dapat menjadi anggota partai politik dan Golkar adalah warga negara Indonesia yang telah melalui penelitian atau panyaringan oleh pengurus partai dan golongan karya yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan antara lain, sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh partai politik dan golongan karya.

Hal ini mengandung pengertian bahwa warga negara Indonesia yang tidak mendaftarkan diri menjadi anggota atau tidak aktif melakukan kegiatan organisasi adalah

massa yang akan diperebutkan dalam setiap pemilu. Dengan demikian maka massa rakyat yang tidak terlibat dalam kegiatan politis praktis sehari-hari dan mereka dapat mencurahkan perhatian dan tenaganya untuk melakukan pembangunan.

Di sinilah pentingnya partai politik sebagai sarana sosialisasi politik mengajarkan norma-norma politik yang ada serta mengajarkan apa yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik sehingga nantinya bisa menjadikan generasi penerus yang berkuwalitas.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa mengenai fungsi partai politik tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hanya saja partai politik dalam prakteknya belum dapat berfungsi secara wajar, ini terbukti dimana partai politik terkadang hanya menyebarkan nilai-nilai dan norma-norma yang menguntungkan partainya saja. Bahkan terkadang partai politik melakukan manipulasi nilai-nilai.

Dengan demikian, jika ditinjau dari hukum Islam tidak sesuai, sebab Islam sendiri menuntut adanya perlakuan yang sama, baik dalam kehidupan politik, sosial ekonomi dan kebudayaan, sehingga tidak sewajarnya manusia membedakan menurut ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan faham politik. (Muhammad S,

negara kedudukannya yang sama dalam hukum dan pemerintah. Dengan pernyataan ini berarti bahwa harkat dan martabat semua warga negara disemua lapisan masyarakat disamakan kedudukannya dalam hukum.

3. Partai Politik Sebagai Sarana Rekrutmen Politik.

Dalam rangka melestarikan keberadaannya partai politik yang merupakan wadah aspirasi rakyat banyak, diperlukan adanya generasi penerus. Untuk melestarikan keberadaan partai politik masyarakat, maka partai politik memegang peranan yang teramat penting yaitu mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut berperan aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (Political Recruitment). (Miriam Budiardjo, 1978, 164).

Adapun cara yang ditempuh oleh partai politik yang satu kemungkinan berbeda dengan cara yang ditempuh oleh partai politik yang lainnya. Namun pada umumnya cara yang ditempuh oleh partai politik adalah melalui kontak pribadi, persuasi dan pengkaderan.

Sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dimasa mendatang akan menggantikan pimpinan lama. Dengan demikian partai politik dapat juga dinyatakan sebagai salah satu cara untuk menyeleksi para warga untuk kemudian diorbitkan menjadi calon-calon pemimpin. Dengan

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa manusia itu oleh Allah diberi kebebasan penuh, akan tetapi kebebasan tersebut yang dituntut tanggung jawab, dikarenakan manusia itu bersifat terbatas. (Sukarna, 1979 , 134).

4. Partai Politik Sebagai Pengatur Konflik Dalam masyarakat

Didalam setiap masyarakat adanya perbedaan pendapat dan persaingan dianggap wajar. Demikian pula adanya konflik asal dalam batas tertentu, sering juga dianggap wajar. Dalam hal yang demikian partai politik berperan untuk mengatur atau menengahi konflik yang terjadi.

Masalah perbedaan pendapat yang ada akhirnya menimbulkan konflik, ini sering terjadi ditubuh DPR yang merupakan unsur yang terpenting dalam proses pengambilan keputusan, itu sering terjadi beda pendapat diantara anggota fraksi. Ketua dewan memberi wewenang kepada para anggota untuk memecahkan masalah tersebut dengan sistem musyawarah. Dan apabila dengan sistem musyawarah tidak berhasil maka ketua dewan menghentikan sidang tersebut. Dan ketua dewan memberikan kesempatan kepada para fraksi dengan melalui pendekatan (lobying). kalau cara ini masih tetap tidak mendapatkan kata sepakat maka terpaksa

diadakan pemungutan suara (voting) yang biasanya menghasilkan kemenangan bagi pihak mayoritas.

Indonesia yang menganut sistem demokrasi pancasila menempatkan musyawarah sebagai hal yang amat penting. Dimana musyawarah merupakan sarana strategis dalam proses pencapaian kesatuan pendapat. Juga berorientasi pada prinsip atau aspek berikut ini yaitu untuk mendorong setiap pribadi agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan keputusan atau kesepakatan yang diambil sebagai jalan keluar dalam pemecahan masalah-masalah bersama. Dengan kata lain untuk menghindarkan sikap masa bodoh dari mereka yang tidak terlibat langsung dalam musyawarah ketika akan melaksanakan hasil musyawarah, dengan dalil yang bermacam-macam. (M. Taopan, 1987, 53).

Asas musyawarah ini sudah disinggung dalam pancasila pada sila keempat dan juga dalam butir-butirnya, yang mana disebutkan akan pentingnya musyawarah. Azas musyawarah ini merupakan syarat mutlak, karena hal itu sudah dicantumkan dalam pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk itulah maka apabila terjadi suatu produk peraturan yang dikeluarkan pemerintah akan di tentang oleh rakyat apabila ternyata peraturan itu sebelumnya tanpa adanya suatu musyawarah.

ahli ibadah yang bijaksana diantara umatku dan musyawarahkanlah urusanmu itu diantara kamu dan jangan membuat keputusan dengan satu pendapat saja." (Mahmud al-Alusi al-Baghdadi, t.t., 46).

Dari uraian di atas tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa musyawarah itu merupakan salah satu kaidah agama yang wajib dilaksanakan oleh kaum khususnya bagi setiap orang yang menjabat sebagai imam atau pimpinan.

Dikarenakan prinsip musyawarah itu dapat menciptakan negara yang aman dan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang bagaimanapun sulitnya, maka sudah sewajarnya bagi para penguasa atau pimpinan pemerintah untuk selalu melakukan musyawarah di dalam setiap menyelesaikan hambatan dan rintangan yang selalu dihadapinya, dengan para wakil-wakil rakyat. Sehingga apa yang terjadi keinginan rakyat serta program-program yang sudah dan akan dilaksanakan selalu selaras dengan apa yang menjadi keinginan rakyat.

Apabila di dalam suatu negara terjadi konflik antara warga negara maupun golongan yang ada, maka partai politik haruslah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik yaitu sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut. Sehubungan dengan hal itu maka partai politik dapat mengatur perbedaan pendapat, mengontrol persaingan agar tetap merupakan persaingan yang sehat dan bahkan dapat pula meredakan konflik yang

terjadi diantara mereka. Sehingga akibat yang mungkin ditimbulkan tidak akan merusak kesatuan dan persatuan bangsa dan negara yang telah dicapai. (Haryanto, 1984, 34).

Sebagai contoh bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pengatur konflik adalah ketika terjadi perselisihan antara partai yang satu dengan partai yang lainnya maka usaha yang dilakukan oleh partai politik adalah melakukan kerja sama yang baik antara orsospol untuk bersama-sama menegakkan demokrasi pancasila dan diantara partai politik tersebut hendaknya tidak boleh saling curiga mencurigai agar segala programnya dapat saling tunjang menunjang.

Dan apabila perselisihan itu terjadi di dalam tubuh partai itu sendiri, maka partai politik yang berfungsi sebagai sarana pengatur konflik memberikan bimbingan dan kesadaran kepada para anggotanya agar menjadi warga yang bertanggung jawab kepada nusa dan bangsa. Akan tetapi adakalanya perselisihan tersebut tidak dapat di atasi sendiri oleh partai yang bersangkutan, sehingga perselisihan itu berlarut-larut tanpa adanya kepastian kapan perselisihan itu berakhir. Kalau sudah demikian maka partai politik yang bersangkutan melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikannya.

Melihat uraian di atas, bila kita kaitkan dengan

fungsi partai politik sebagai sarana pengatur konflik, maka karena adanya kemaslahatan-kemaslahatan yang diperoleh dari pelaksanaan fungsi itu sendiri, maka menurut hukum Islam di perbolehkan. Hanya dalam beberapa kenyataannya ternyata fungsi partai politik sebagai penengah konflik, masih terasa kurang sekali. Partai politik bukannya sering mendamaikan, tetapi ikut menambah konflik yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian partai politik dalam fungsinya tersebut sekurang-kurangnya dapat melakukan pengawasan dan membantu dalam pengaturan kehidupan bernegara yang baik.